



Peran Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan UMKM

Anjur Perkasa¹, Azhar², Kurnia Ikhlas³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ anjurpohan@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan, implementasi operasional, kendala, serta peluang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanjung Pura. Meskipun masyarakat setempat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, pra-penelitian menunjukkan mayoritas UMKM masih bergantung pada transaksi tunai, pencatatan manual, dan belum memahami akad finansial syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari pelaku UMKM dan pihak terkait. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memaknai prinsip syariah secara kuat pada dimensi etis-spiritual (kejujuran dan keberkahan), tetapi belum menerjemahkannya ke dalam aspek teknis-administrasi seperti akuntabilitas pencatatan (*amanah*) dan transparansi (*shiddiq*). Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya literasi akuntansi syariah, persepsi kerumitan pembukuan, serta minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, peluang pengembangan sangat terbuka melalui optimalisasi ekosistem digital halal dan pendekatan kemitraan komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi tata kelola keuangan berbasis syariah sangat mendesak untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pembiayaan formal, dan menjamin keberlanjutan UMKM di tingkat lokal.

Kata Kunci

Ekonomi Syariah, Pengelolaan Keuangan, UMKM, Tanjung Pura, Transparansi Finansial.

PENDAHULUAN

Prinsip ekonomi syariah memberikan kerangka etis berbasis keadilan, transparansi, amanah, dan larangan praktik yang merugikan, yang didukung oleh regulasi nasional seperti OJK, Kementerian UMKM, serta lembaga keuangan syariah. Di Tanjung Pura, nilai-nilai syariah memiliki relevansi yang sangat kuat karena masyarakatnya yang religius menjadikan ajaran agama sebagai rujukan normatif dalam mengelola arus kas dan transaksi usaha harian.

Idealita ini seharusnya menjadi panduan utama bagi UMKM untuk menerapkan tata kelola keuangan yang konsisten. Namun, hasil pra-penelitian menunjukkan kesenjangan tajam antara nilai normatif dan kondisi operasional UMKM di Tanjung Pura. Sebanyak 8 dari 10 UMKM masih sangat bergantung pada transaksi tunai, menggunakan pencatatan manual yang belum teratur, serta belum familiar dengan akad maupun instrumen pembiayaan syariah. Rendahnya pemanfaatan teknologi keuangan seperti QRIS dan kurangnya pemahaman atas prinsip syariah dalam pengelolaan arus kas menegaskan adanya *gap* nyata antara ekspektasi sistem keuangan syariah dengan praktik bisnis sehari-hari.

Dampak Manajerial dan Peluang Pengembangan Ketidakmampuan menyelaraskan pencatatan keuangan dengan prinsip syariah berdampak langsung pada tingginya ketidakpastian arus kas, rendahnya kredibilitas usaha di mata lembaga pembiayaan, dan terbatasnya akses permodalan dari bank syariah. Di sisi lain, penyelarasan tata kelola keuangan sesuai prinsip syariah memuat peluang besar, seperti meningkatnya kepercayaan konsumen produk halal, akses jaringan bisnis yang lebih luas, dan kejelasan arah pengembangan usaha yang terstruktur.

Penelitian ini didukung oleh kajian-kajian terdahulu yang memetakan hambatan serupa pada skala mikro. Andriany dan Nasution (2022) menegaskan bahwa pemahaman akad syariah berpengaruh besar pada keberhasilan pengelolaan pembiayaan UMKM. Lebih lanjut, Zihanuddin (2024) menemukan hubungan signifikan antara literasi keuangan syariah dengan perilaku ekonomi pelaku usaha, sementara Putri dkk. (2025) turut mengonfirmasi bahwa keterbatasan penerapan manajemen keuangan syariah secara teratur masih menjadi masalah umum pada UMKM di berbagai daerah.

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) karena studi sebelumnya lebih mendominasi ranah kuantitatif, berfokus pada produk pembiayaan semata, serta belum menggali pengalaman subjektif pelaku usaha terkait keterkaitan idealita dan realita di tingkat operasional kecamatan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini sangat urgent dilakukan guna mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaku UMKM di Tanjung Pura memaknai dan mengimplementasikan prinsip syariah dalam praktik keuangan harian mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi, kendala, dan makna subjektif prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan harian UMKM di

Tanjung Pura. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pelaku UMKM dan pihak terkait, observasi langsung terhadap aktivitas transaksi serta sistem pencatatan usaha, serta dokumentasi laporan finansial sederhana yang dimiliki subjek. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik, seperti keberadaan usaha di Tanjung Pura, keragaman jenis produk, serta kesediaan untuk membagikan informasi pengelolaan finansial mereka.

Teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data (menyeleksi dan memfokuskan data lapangan), penyajian data (*data display* dalam bentuk narasi terstruktur), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Melalui alur metodologi ini, penelitian mampu menghasilkan gambaran holistik mengenai *gap* antara idealita normatif syariah dan realita operasional UMKM pada tingkat kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Tanjung Pura, ditemukan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM masih berada pada tahap transisi antara pemahaman normatif dan penerapan operasional. Masyarakat Tanjung Pura memiliki ikatan kultural dan religius yang kuat, sehingga seluruh pelaku UMKM yang menjadi informan sepakat bahwa nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kehalalan, merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha. Pemaknaan keberkahan juga menjadi aspek penting, di mana keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari ketenangan dan keyakinan bahwa aktivitas usaha telah dilakukan sesuai dengan nilai agama. Meskipun demikian, ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, masih ditemukan kesenjangan yang cukup nyata. Mayoritas pelaku usaha belum mampu menerjemahkan nilai amanah dan *shiddiq* ke dalam bentuk pencatatan keuangan yang tertib, pemisahan kas usaha dan pribadi, serta penggunaan instrumen transaksi yang lebih modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman syariah masih dominan pada aspek etis-spiritual dan belum sepenuhnya berkembang ke arah etis-administratif yang menekankan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan usaha.

Praktik pengelolaan keuangan UMKM di Tanjung Pura juga masih didominasi oleh sistem tradisional. Lebih dari 80% informan belum memiliki

buku kas harian, sedangkan pencatatan umumnya hanya dilakukan pada transaksi kredit atau utang pelanggan. Transaksi tunai harian cenderung langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa pemisahan rekening atau dompet usaha. Pola ini menyebabkan kondisi keuangan usaha menjadi kurang jelas karena pelaku UMKM tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah modal, pendapatan, pengeluaran, maupun keuntungan bersih yang diperoleh. Dari perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pencatatan transaksi sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Budaya transaksi tunai yang dominan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya tata kelola keuangan yang transparan dan kemampuan usaha untuk memenuhi persyaratan akses pembiayaan formal.

Kendala penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan kemampuan akuntansi, persepsi bahwa pembukuan merupakan kegiatan yang rumit dan memerlukan waktu, serta rendahnya pemahaman mengenai perbedaan akad syariah menjadi hambatan utama. Sebagian pelaku usaha masih belum memahami fungsi akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dalam kegiatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literasi antara nilai agama yang diyakini dan kemampuan menerapkannya dalam instrumen ekonomi syariah yang bersifat teknis.

Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan masih terbatasnya sosialisasi dan pendampingan langsung dari lembaga keuangan syariah, persyaratan administratif yang dianggap rumit, serta belum optimalnya infrastruktur pembayaran digital di beberapa kawasan pasar tradisional. Hambatan yang muncul dengan demikian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Persepsi terhadap kompleksitas administrasi membuat sebagian pelaku UMKM enggan berhubungan dengan lembaga keuangan formal meskipun memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih tertib. Di sisi lain, pendekatan lembaga keuangan syariah dinilai masih lebih banyak berorientasi pada pemasaran produk dan pencapaian target pembiayaan dibandingkan fungsi edukasi serta pendampingan bagi usaha mikro. Hal ini menyebabkan keberadaan produk keuangan syariah belum sepenuhnya dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di tingkat lokal.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, penelitian ini juga menemukan peluang yang cukup besar untuk mengoptimalkan penerapan keuangan syariah dalam mendukung keberlanjutan usaha. Tingginya

kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dan kuatnya nilai religius dapat menjadi modal sosial dalam membangun ekosistem usaha yang berbasis syariah. Selain itu, pelaku UMKM menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari pencatatan keuangan dan penggunaan layanan keuangan syariah apabila edukasi dilakukan secara bertahap, sederhana, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pemanfaatan QRIS, aplikasi pembukuan digital, serta pembiayaan melalui BMT atau bank syariah berpotensi menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat akses UMKM terhadap layanan keuangan formal.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi optimalisasi keuangan syariah pada UMKM perlu dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek utama dalam proses pendampingan. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pelatihan pembukuan sederhana berbasis digital, penyederhanaan pemahaman akad syariah sesuai kebutuhan usaha mikro, serta penguatan kolaborasi antara akademisi, tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah. Pendampingan secara berkala juga diperlukan agar perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dalam memisahkan kas usaha, melakukan pencatatan, menggunakan transaksi digital, dan memilih sumber pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah pada UMKM tidak berhenti pada nilai moral dan simbolik, tetapi dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran serta implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Tanjung Pura, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) yang nyata antara pemahaman normatif dan ketaatan operasional. Pelaku UMKM di Tanjung Pura memaknai prinsip syariah secara kuat pada dimensi etis-spiritual—seperti kejujuran, keadilan menakar, dan pencarian keberkahan (*barakah*)—sejalan dengan tingginya nilai religiusitas masyarakat setempat. Namun, nilai-nilai tersebut belum terefleksikan secara optimal ke dalam aspek teknis-administrasi. Praktik pengelolaan keuangan harian masih didominasi oleh transaksi tunai tanpa rekapitulasi, pencatatan manual berbasis ingatan, serta pencampuran antara kas usaha dan keuangan pribadi, yang pada akhirnya mengaburkan profitabilitas riil dan menurunkan tingkat *bankability* usaha.

Kondisi tersebut dipicu oleh keterbatasan literasi akuntansi syariah, persepsi kerumitan pembukuan, serta minimnya pendampingan terstruktur dan sosialisasi langsung dari lembaga keuangan syariah di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, peluang pengembangan tata kelola keuangan berbasis syariah di Tanjung Pura sangat terbuka lebar mengingat tingginya potensi pasar produk halal dan besarnya kepercayaan konsumen terhadap nilai-nilai lokal. Transformasi pengelolaan keuangan UMKM menuju standar syariah yang tertata dan transparan tidak hanya mendesak untuk mencegah risiko kebangkrutan, tetapi juga menjadi kunci utama dalam membuka akses permodalan formal dan menjamin keberlanjutan usaha (*business sustainability*) di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D., & Nasution, M. L. (2022). Penerapan pembiayaan mudharabah pada UMKM di Desa Pematang Serai. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45-58.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Baqarah ayat 282.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, A. R., Pratama, I., & Suryani, N. (2025). Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 112-125.
- Zihanuddin, M. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan terhadap keputusan menabung pelaku UMKM. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Ekonomi Syariah*, 4(2), 89-101.